

**IMPLIKASI HUKUM KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN  
DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DPD RI) DALAM  
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG (STUDI KASUS  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 91/PUU-XVIII/2020)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**BADIKENITA**

**2040057043**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2023**

**IMPLIKASI HUKUM KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN  
DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DPD RI) DALAM  
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG (STUDI KASUS  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 91/PUU-XVIII/2020)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Oleh:

**BADIKENITA**

**2040057043**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2023**

## VISI & MISI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

### **Visi:**

Menjadi Universitas yang unggul dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila pada taun 2034.

### **Misi:**

1. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan sistem pelayanan administrasi akademik dan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Meningkatkan mutu lulusan yang berintegritas dan kompeten di bidangnya serta mampu bersaing di era global.
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang berkelanjutan
4. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mengembangkan hubungan kerjasama dengan institusional/ internasional yang saling menguntungkan dan lembaga-lembaga gerejawi dalam semangat ekumenis.

## **VISI & MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

### **Visi :**

Menjadi Fakultas Hukum unggulan di kawasan Asia pada tahun 2030 di bidang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan pancasila.

### **Misi :**

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum, yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.

6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.

**Nilai-nilai UKI**

1. Rendah Hati | Filipi 2:3b
2. Berbagi dan Peduli | Ibrani 10:24
3. Disiplin | Efesus 5:16
4. Profesional | Matius 25:21
5. Bertanggung Jawab | Matius 25:23
6. Berintegritas | Amsal 19:1



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM**

**PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan:

Nama : Badikenita  
NIM : 2040057043  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“Implikasi Hukum Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020)”** adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 31 Januari 2023  
Yang membuat pernyataan,



Badikenita  
NIM: 2040057043



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

Oleh :

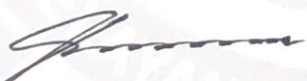
**Nama** : Badikenita  
**NIM** : 2040057043  
**Program Studi** : Hukum  
**Peminatan/Program Kekhususan** : Hukum Tata Negara  
**Judul** : Implikasi Hukum Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020)

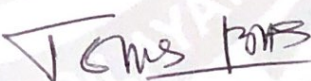
telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 10 Februari 2023  
Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

  
(Dr. Hulman Panjaitan S.H., M.H.)  
NIDN : 0020096802

  
(Tomson Situmeang S.H., M.H.)  
NIDN : 0325028101

Ketua Program Studi Hukum

  
(Dr. Rr. Anji Wijayati, SH., M.Hum.)  
NIDN : 0327046303

  
(Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H.)  
NIDN : 0302117904



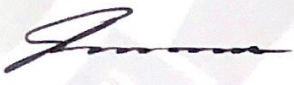
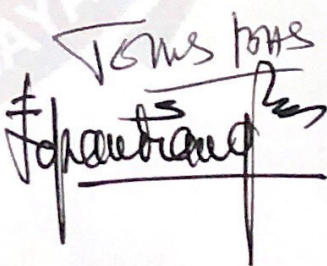
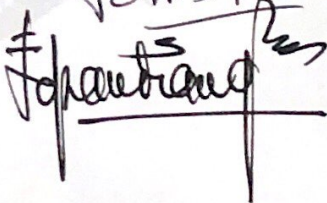
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI**

Pada tanggal 10 Februari 2023 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

**Nama** : Badikenita  
**NIM** : 2040057043  
**Program Studi** : Hukum  
**Fakultas** : Hukum  
**Judul** : Implikasi Hukum Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020)

oleh tim penguji yang terdiri dari :

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan dalam Tim Penguji</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1. <u>Dr. Hulman Panjaitan S.H., M.H.</u> NIDN : 0020096802	Ketua	
2. <u>Tomson Situmeang S.H., M.H.</u> NIDN : 0325028101	Anggota	
3. <u>L. Elly AM Pandiangan, S.H., M.H.</u> NIDK : 8985060022	Anggota	





**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**IMPLIKASI HUKUM KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN  
DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DPD RI) DALAM PEMBENTUKAN  
UNDANG-UNDANG (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020)**

**Skripsi**

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu pada Fakultas  
Hukum Universitas Kristen Indonesia

**Disusun oleh :**

**Nama : Badikenita**

**NIM : 2040057043**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 10 Februari 2023 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat  
untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1)

Susunan Tim Penguji

Penguji I

Dr. Hulman Panjaitan S.H., M.H.  
NIDN : 0020096802

Penguji II

Tomson Situmeang S.H., M.H.  
NIDN : 0325028101

Penguji III

L. Elly AM Pandiangan, S.H., M.H.  
NIDK 8985060022



## UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

### Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Badikenita  
NIM : 2040057043  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Jenis Tugas Akhir : Skripsi  
Judul : Implikasi Hukum Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020)

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 15 Februari 2023

menyatakan



Badikenita

NIM: 2040057043

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih dan pemeliharaan-Nya peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan damai sejahtera dan tepat pada waktunya. Tanpa penyertaan-Nya penulis tidak dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

Penelitian ini disusun agar pembaca dapat memperluas ilmu tentang Hukum Tata Negara khususnya yang berkaitan dengan kewenangan lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Indonesia dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Implikasi Hukum Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020)”.

Penelitian ini disusun melalui berbagai tantangan. Mulai dari tantangan yang datang dari dalam diri penulis maupun dari luar penulis. Namun, seluruh tantangan tersebut merupakan langkah penulis untuk terus berharap kepada Tuhan Yesus Kristus yaitu Sang penolong sejati. Sehingga, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini sepenuhnya karena pertolongan Tuhan Yesus Kristus dan didukung oleh keluarga, dosen, dan kerabat.

Penelitian ini memuat kewenangan yang dimiliki DPD dalam membahas rancangan undang-undang termasuk pemberian persetujuan rancangan undang-undang menjadi undang-undang yang masih terbatas. Dalam hal ini peneliti melakukan Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap UU Cipta Kerja. Walaupun penelitian ini masih terdapat kekurangan dalam penyusunannya, tetapi memberikan gagasan yang detail terkait dengan kewenangan DPD dalam pembentukan undang-undang sesuai dengan tujuan filosofis pembentukan DPD.

Dalam penyusunan penelitian ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan orang-orang terhadap penulis. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Hardjono S.H., M.H., M.B.A selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr. Hulman Panjaitan S.H., M.H. selaku Wakil Rektor Sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
4. Bapak Tomson Situmeang S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan dedikasinya untuk memberikan ilmu hukum selama penulis berkuliah.
7. Ibu saya Mulisip Boru Parangin-angin Simanjorang yang selalu mendoakan dan mendukung peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Agatha Beatrice Br. Simanjuntak dan Jeremy Lawrance Simanjuntak selaku anak kandung yang selalu mendoakan peneliti dalam menyusun penelitian ini.
9. Staf B-8 DPD RI khususnya Nisa Nasution yang telah siap sedia membantu dan mendukung penulis selama proses perkuliahan dan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Roni Pradana dan Rinaldo, sekretariat PPUU DPD RI yang telah siap sedia membantu dan mendukung penulis selama proses perkuliahan dan dalam penyusunan penelitian ini.
11. Seluruh teman-teman yang sangat baik terhadap penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Penulis mendoakan semoga jasa dan budi baik yang telah penulis terima, kiranya mendapat imbalan yang lebih baik dari Tuhan Yesus Kristus. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan atau bisa dikatakan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sungguh mengharapkan masukan berupa saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk meningkatkan kebaikan dikemudian hari.

Akhir kata penulis berharap penelitian skripsi ini dapat menjadi berkat bagi penulis dan pembaca serta menjadi rekomendasi bagi DPR, Presiden dan masyarakat luas untuk menjadikan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah yang optimal bagi kemajuan daerah sesuai tujuan pembentukan DPD. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.

Jakarta, Januari 2023

Penulis,



Badikenita

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>VISI &amp; MISI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA .....</b>	<b>ii</b>
<b>VISI &amp; MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN KEASLIAN PENELITIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PUBLIKASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
D. Maksud dan Tujuan Penelitian .....	8
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	9
1. Kerangka Teori .....	9
2. Kerangka Konsep.....	11
F. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Pendekatan Penelitian .....	13
3. Jenis dan Sumber Data .....	13
4. Teknik Pengumpulan Data .....	14
G. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>17</b>
A. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	17

B. Landasan Dan Sumber Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan .....	28
C. Sumber Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	30
D. Teori-teori.....	34
1. Teori Kewenangan .....	34
2. Teori Kedaulatan Rakyat.....	38
E. Tulisan Terkait Dengan Tema Penulisan .....	42
<b>BAB III KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA .....</b>	<b>46</b>
A. Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pembentukan Undang-Undang.....	46
B. Makna Lembaga Perwakilan Daerah.....	47
C. Kewenangan DPD .....	48
D. Perkembangan Kewenangan DPD.....	53
E. Mekanisme Pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta kerja oleh DPD .....	63
<b>BAB IV IMPLIKASI HUKUM PASCA PUTUSAN MK NO. 91/PUU-XVIII/2020.....</b>	<b>83</b>
A. Partisipasi Publik dan Undang-undang yang Responsif.....	90
1. Masyarakat Mandiri dan Pembentukan Hukum .....	90
2. Konfigurasi Politik Hukum .....	96
B. Merekayasa Pembentukan UU sebagai Bentuk Kedaulatan Publik	99
C. Model Partisipasi Publik dalam Pembentukan UU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 ...	101
D. Kemanfaatan Model Partisipasi bagi DPD .....	106
E. Mekanisme Partisipasi Publik di DPD .....	121
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>127</b>
A. Kesimpulan.....	127
B. Saran .....	128
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>129</b>

## ABSTRAK

- A. Nama : Badikenita  
B. NIM : 2040057043  
C. Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
D. Judul Skripsi : Implikasi Hukum Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020)  
E. Jumlah Halaman : i-xvi 128 + 6 Halaman  
F. Kata Kunci : DPD, Pembentukan UU, Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020  
G. Ringkasan Isi :

Sejak berdirinya Dewan Perwakilan Daerah, konfigurasi lembaga perwakilan dan lembaga legislatif di Indonesia berubah. Dalam perubahan Kedua UUD 1945 yang termuat di dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B yang memberikan penekanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan hubungan pusat dan daerah dilaksanakan dengan sistem otonomi luas. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Pembentukan Undang-Undang khususnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan bagaimana Implikasi Hukum Pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dan dalam pelaksanaannya didukung dengan penelitian yuridis empiris dan pendekatan berupa perundang-undangan dan konseptual. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa bahan hukum primer yang terdiri dari beberapa UU dan Putusan MK Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 serta bahan sekunder berupa buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan kewenangan DPD.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa DPD lahir sebagai langkah membangkitkan harapan masyarakat di daerah bahwa kepentingan daerah dan masalah-masalah yang dihadapi daerah dapat diangkat dan diperjuangkan di tingkat nasional. DPD berperan dalam mempengaruhi materi Undang-undang Cipta Kerja dengan cukup dominan, walaupun tidak sampai pada pengesahan. Sehingga implikasi atas putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bertambahnya jumlah RUU dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2022 dan Perubahan kedua undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- H. Daftar Acuan : 5 Peraturan Perundang-Undangan, Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 45 Buku, 25 Jurnal  
I. Dosen Pembimbing I : Dr. Hulman Panjaitan S.H., M.H.  
Dosen Pembimbing II : Tomson Situmeang S.H., M.H.

Jakarta, Januari 2023  
Penulis,

Badikenita



## ABSTRACT

- A. Name : Badikenita  
B. NIM : 2040057043  
C. Specific Program : Constitutional Law  
D. Thesis Title : *Legal Implications of the Authority of the Regional Representatives Council of the Republic of Indonesia (DPD RI) in Forming Laws (Case Study of Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020)*  
E. Number of Pages : i-xvi 128 + 6 Pages  
F. Keywords : *DPD, Law Formation, MK Decision Number 91/PUU-XVIII/2020*  
G. Content Summary :

*Since the founding of the Regional Representatives Council, the configuration of representative institutions and the legislature in Indonesia has changed. In the second amendment to the 1945 Constitution which is contained in Article 18, Article 18A, and Article 18B which emphasizes the implementation of regional government and central and regional relations carried out with a broad autonomy system. The formulation of the problem in this thesis is how is the authority of the Regional Representatives Council of the Republic of Indonesia in Forming Laws, especially Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, and what are the Legal Implications After the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020.*

*This research uses a type of normative juridical research, and in practice it is supported by empirical juridical research and approaches in the form of legislation and conceptual. The types and sources of data used are primary data in the form of interview results and secondary data in the form of primary legal materials consisting of several laws and decisions of the Constitutional Court Decision of the Constitutional Court Number 91/PUU-XVIII/2020 as well as secondary materials in the form of books, journals and other scientific papers relating to the authority of the DPD.*

*From the results of this study it can be concluded that the DPD was born as a step to raise the hopes of the people in the regions that regional interests and problems faced by the regions can be raised and fought for at the national level. The DPD played a dominant role in influencing the material of the Job Creation Law, even though it did not reach ratification. So that the implications of the Constitutional Court decision Number 91/PUU-XVIII/2020, the increase in the number of bills in the 2022 Priority National Legislation Program and the second amendment to law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation.*

- H. List of References : *5 Laws and Regulations, MK Decision Number 91/PUU-XVIII/2020, 45 Books, 25 Journals*  
I. Advisor I : *Dr. Hulman Panjaitan S.H., M.H.*  
Advisor II : *Tomson Situmeang S.H., M.H.*

*Jakarta, January 2023*  
*Writer,*  
*Badikenita*